

**LAPORAN BULANAN BPP PROVINSI PAPUA
TENGAH BULAN APRIL 2025**



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

**WILAYAH BPP PAPUA TENGAH
POKJA PAPUA SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF DAN POLHUKAM
TAHUN 2025**





**PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com
Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 04/IV/2025/BPP.PT
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan BPP
Bulan April 2025

Nabire, 29 April 2025
Kepada
Yth. **Kanwil DJPB
Provinsi Papua**

di
Jayapura.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Laporan Bulanan BP3OKP Papua Tengah Bulan April 2025
Demikian untuk menjadi Maklum.

**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
(BP3OKP)**

**SEKRETARIAT
BP3OKP NABIRE**



IRJEN POL (P) DRs. PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA).....	5
B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK.....	5
C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN.....	6
D. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	6

Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Februari ini diantaranya adalah :

- Rapat Koordinasi kerja Dinas PU PPT dengan Anggota BPP PPT (10/04/2025)
- Rapat Koordinasi Kerja Dinas BPD PPT dengan Anggota BPP PPT (10/04/2025)
- Rapat 6 BPP dan 6 Gubernur di nabire (15/04/2025)
- Rapat zoom tindak lanjut kegiatan rakor 15/04/2025 bersama 6 Anggota BPP Se-Papua Raya. (23/04/2025)
- Menghadiri undangan Pelantikan TP-PKK Provinsi Papua Tengah, Oleh gubernur papua tengah (23/04/2025)
- Rapat kerja para bupati 8 kabupaten provinsi papua tengah bersama BP3OKP kolaborasi percepatan pembangunan menuju papua sejahtera.(24/04/2025)
- Menghadiri undangan upacara pemprov (25/04/2025)
- Mengikuti pemeriksaan kesehatan bersama KPPN Nabire (25/04/2025)
- Mengikuti Rapat Zoom Pengelolaan Dana Otsus (25/04/2025)

1. Pokja Papua Produktif

- Rapat Koordinasi Kerja Pokja Papua Produktif bersama PT Irian Bakti(11/04/2025)
- Rapat 6 BPP dan 6 Gubernur di nabire (15/04/2025)
- Rapat bersama Dapur pengusaha Papua (DPP) (16/04/2025)
- Mengikuti pemeriksaan kesehatan bersama KPPN Nabire (25/04/2025)
- Mengikuti Rapat Zoom Pengelolaan Dana Otsus (25/04/2025)
- Mendampingi gubernur menjemput wemendikisaintek tinjau lokasi pembangunan SMA unggulan Garuda di papua tengah mewakili Anggota BPP. (28/04/2025)

2. Pokja Papua Cerdas

- Rapat 6 BPP dan 6 Gubernur di nabire (15/04/2025)
- Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Dirjen GTK di jakarta (23/04/2025)
- Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Dirjen PAUDDIKDASMEN (24/04/2025)

3. Pokja Papua sehat

- Rapat 6 BPP dan 6 Gubernur di nabire (15/04/2025)
- Rapat kerja kesehatan daerah ke-1 (22/04/2025)
- Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Kementerian Pendidikan di jakarta (22/04/2025)-(26/04/2025)

4. Pokja Polhukam

- Rapat 6 BPP dan 6 Gubernur di nabire (15/04/2025)
- Sosialisasi musrembang otsus oleh Bappenas RI (15/04/2025)
- Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Kementerian Pendidikan di jakarta (22/04/2025)-(26/04/2025)

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera” dengan salah satu lainnya. Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan Maret yang dapat kami sampaikan.

A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja selama bulan April 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

No	KEGIATAN PRIORITAS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)	MISI RIPP
01	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat bersama 6 Anggota BPP & 6 Gub di papua (15/04/2025)➤ Rapat kerja para bupati 8 kabupaten provinsi papua tengah bersama BP3OKP kolaborasi percepatan pembangunan menuju papua sejahtera.(24/04/2025)	Anggota BPP PPT
02	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat bersama 6 Anggota BPP & 6 Gub di papua (15/04/2025)➤ Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Dirjen GTK di jakarta (23/04/2025)➤ Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Dirjen PAUDDIKDASMEN (24/04/2025)	Papua Cerdas
03	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat bersama 6 Anggota BPP & 6 Gub di papua (15/04/2025)	Papua Produktif
04	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat bersama 6 Anggota BPP & 6 Gub di papua (15/04/2025)➤ Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Dirjen GTK di jakarta (23/04/2025)➤ Rapat Koordinasi percepatan layanan pendidikan di Papua Tengah dengan Dirjen PAUDDIKDASMEN (24/04/2025)	Papua Polhukam
05	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat bersama 6 Anggota BPP & 6 Gub di papua (15/04/2025)	Papua Sehat

1. Anggota BPP Provinsi Papua Tengah

- Rapat Koordinasi kerja Dinas PU PPT dengan Anggota BPP PPT (10/04/2025)
- Rapat Koordinasi Kerja Dinas BPD PPT dengan Anggota BPP PPT (10/04/2025)



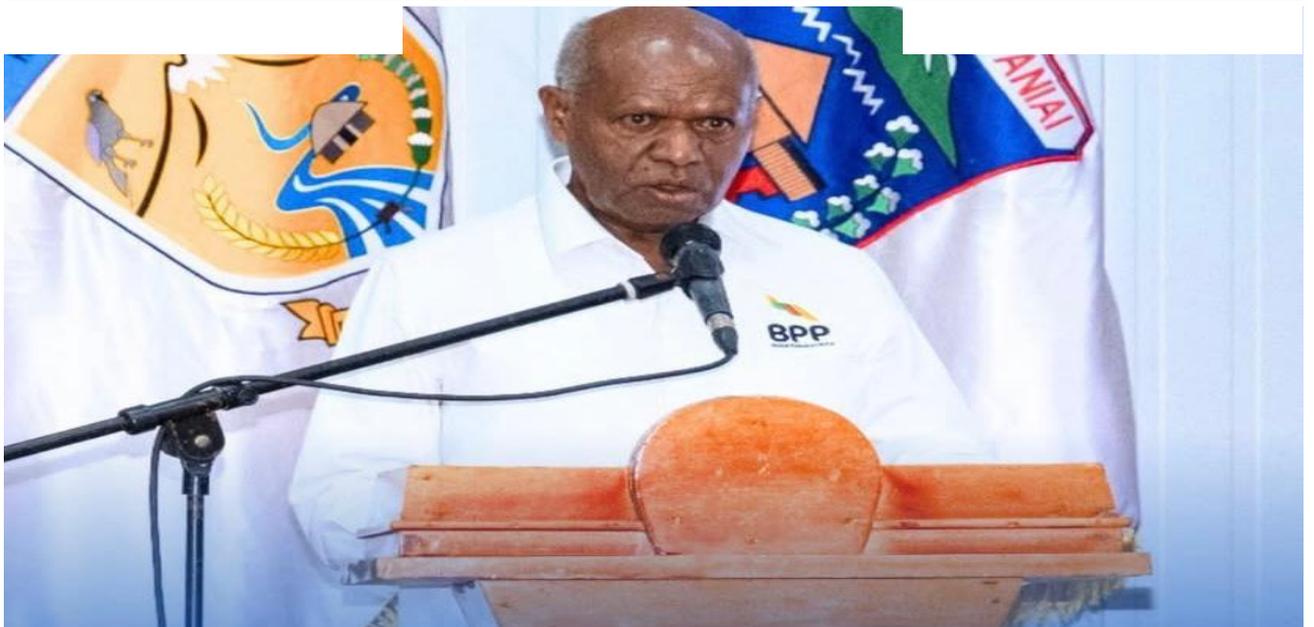
- Rapat Percepatan Pembangunan Papua bersama 6 BPP dan 6 Gubernur se-papua Raya (15/04/2025). (Anggota BPP Papua & seluruh Pokja)





Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah mengatakan, hasil yang dibawa ke pusat haruslah yang berdasarkan kepentingan rakyat.

"Di moment ini kita akan merumuskan supaya rakyat bisa sejahtera, bagaimana agar masyarakat papua tidak tertinggal, demi menuju Indonesia emas Tahun 2025," ungkapnya.



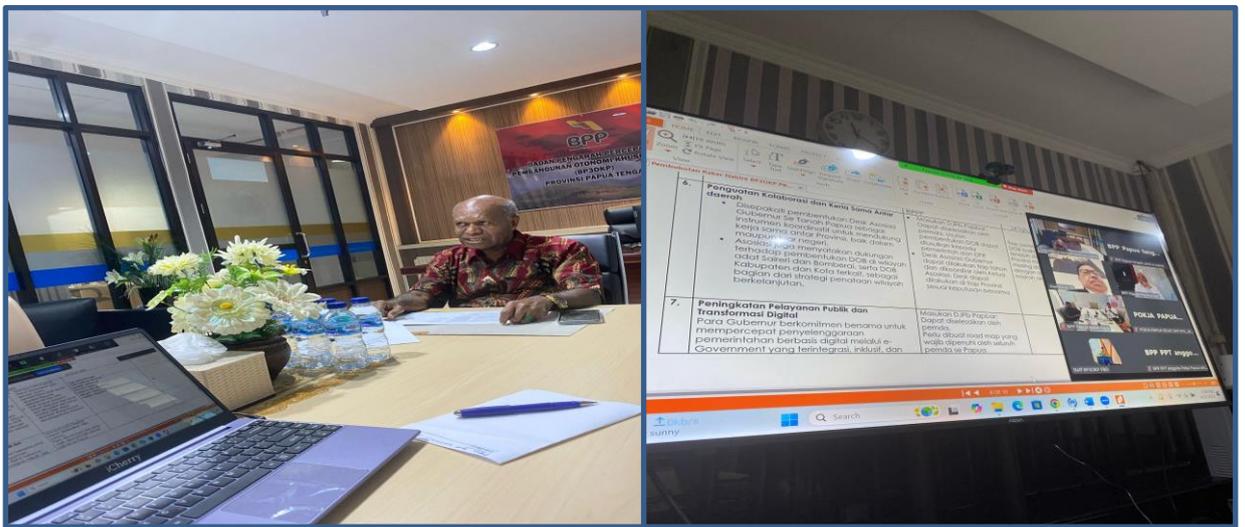
Adapun hasil rapat menghasilkan beberapa hal yang akan diusulkan kepada presiden RI, :

1. Penguatan Pelaksanaan Otonomi Khusus.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua.
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas.
4. Reformasi tata kelola Pemerintahan Daerah
5. Penguatan kolaborasi antar daerah.
6. Peningkatan layanan publik dan Transformasi Digital.
7. Perlindungan Ekologis dan Kebijakan Afirmasi sosial.

➤ Rapat Zoom tindaklanjut kegiatan rakor 6 bpp dan 6 gubernur se-papua raya (23/04/2025)

Hasil yang dicapai dari rapat tindaklanjut bersama 6 BPP se-papua raya 23/04/2025 terdapat 9 point yang akan di paparkan kepada ketua BPP di jakarta yaitu

- Penguatan pelaksanaan otonomi khusus papua
- Penguatan sumber daya manusia papua
- Kesehatan
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas
- Rekomendasi tata kelola pemerintah daerah
- Penguatan kolaborasi dan kerja sama antar daerah
- Peningkatan pelayanan publik dan transformasi digital
- Perlindungan ekologis dan kebijakan akan afirmasi sosial
- Penegasan kepemimpinan papua dalam arsitektur pembangunan nasional



➤ Pelantikan TP-PKK Provinsi Papua Tengah (23/04/2025)

Anggota BPP menghadiri undangan pelantikan TP-PKK, gubernur papua tengah melantik pengurus tim penggerak pembendarahan dan kesejahteraan keluarga, tim pembina posyando dan dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Papua tengah priode 2025-2030.



- Rapat kerja para bupati 8 kabupaten provinsi papua tengah bersama BP3OKP kolaborasi percepatan pembangunan menuju papua sejahtera.(24/04/2025)
 - Penyampaian rencana kerja bupati 8 kabupaten 5 tahun mendatang
 - Menyampaikan situasi pembangunan di masing-masing daerah.
 - Harapan mulai tahun 2025 mulai terjalin kerja sama baik bersama BPP, Provinsi, Kabupaten hingga kementerian dan presiden untuk masalah kesehatan, pendidikan, terbukanya lowongan pekerjaan bagi OAP dan peningkatan keamanan di daerah konflik.



- Menghadiri undangan upacara oleh pemerintah daerah (25/04/2025)



- Mengikuti pemeriksaan kesehatan bersama KPPN nabire (25/04/2025)



- Mengikuti Rapat Zoom Pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua (25/04/2025)



- Rapat koordinasi Anggota DPRD bersama Anggota BPP (28/04/2025)



2. Pokja Papua Produktif

- Rapat Koordinasi Kerja bersama PT Irian (11/04/2025)
dalam rapat koordinasi tersebut ruben magai sebagai pokja papua produktif menyampaikan bahwa perlunya kerjasama antara PT. irian bakti dan pemerintah dengan membuka jembatan agar kedepannya daerah pedalaman papua bisa mendapatkan beras dalam bantuan bansos dan juga terbukanya lapangan kerja bagi OAP di PT irian Bakti.



- Rapat bersama Dapur pengusaha Papua (DPP) (16/04/2025)
Rapat tentang papua kreatif dari semua kelompok wirausaha swasta yang bergerak pada peternakan, perkebunan dan perikanan.



- Mengikuti pemeriksaan kesehatan bersama KPPN nabire (25/04/2025)



- Mengikuti rapat Zoom pengelolaan dana otonomi khusus papua (25/04/2025)



- Pokja Papua Produktif Mendampingi gubernur menjemput wemendikisaintek tinjau lokasi pembangunan SMA unggulan Garuda di papua tengah mewakili Anggota BPP. (28/04/2025)



5 lokasi pembangunan yang ditinjau di Nabire tersebut meliputi Karadiri 3 lokasi, Wanggar, Kalisemen, serta satu SD Jayanti. Dikatakan oleh Stella Pembangunan SMA Unggul Garuda ini merupakan upaya mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses merata bagi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.



"Kita harapkan dengan adanya pembangunan SMA Unggul Garuda akan terjadinya dari kualitas SDM (sumber daya manusia) di Indonesia termasuk " Ujar Wamen Stella.

Wemendikisaintek menambahkan, SMA Unggul Garuda akan menjadi sekolah berprestasi agar para siswa bisa bersama mengenal satu sama lain dan peka terhadap keragaman Indonesia, sehingga ke depan mampu menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana serta memiliki wawasan global dan kepekaan lokal.

3. Pokja Papua Sehat

- Undangan pemateri di rapat kerja kesehatan daerah ke-1 oleh dinas kesehatan Provinsi Papua Tengah dengan tema "kebijakan BP3OKP bidang Kesehatan di Papua Tengah. (22/04/2025)

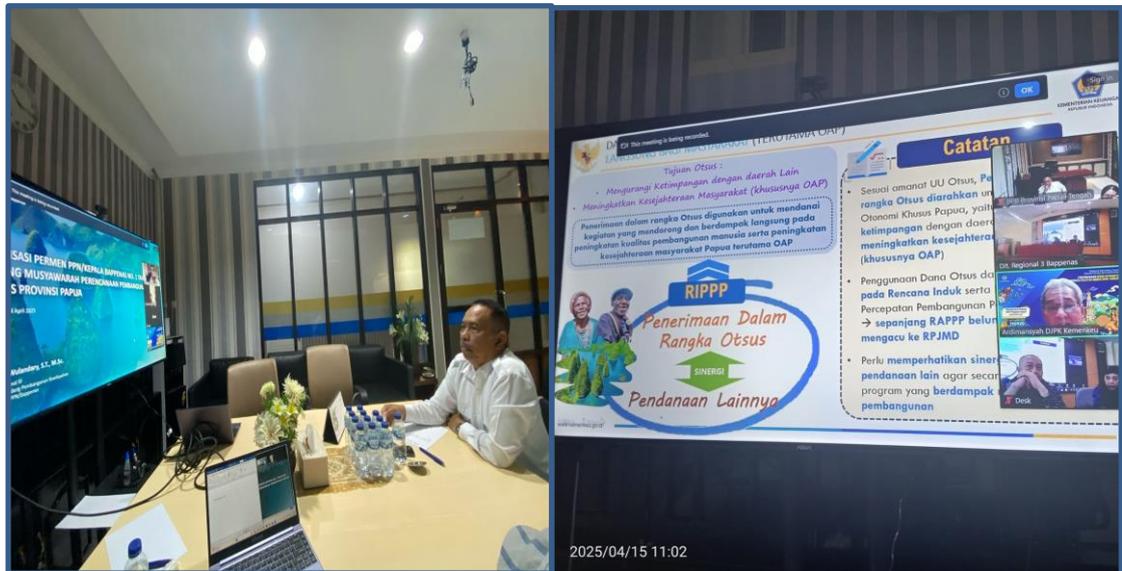
Terdapat 3 point Yang dapat diuraikan dari materi yang disampaikan pokja papua sehat yaitu:

- Keberadaan BP3OKP dan fungsinya
- Kerja Pokja Papua Sehat dan menjadi tugas tanggung Dinkes dan RSUD serta Dinas Pelberdayaan.
- Kebijakan dab penggunaan Dana Otsus dan persentasenya.



4. Pokja Polhukam

- MengSosialisasi Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1Th.2025 dan lokakarya penggunaan SIIPPP dalam Pelaksanaan Musrembang Otsus 15/04/2025



5. Pokja Papua Cerdas

- Rapat dengan Dirjen GTK di Jakarta (Rabu, 23 April 2025)

Topik Rapat

- Penuntasan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Tanah Papua
- Perluasan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, yang tidak terjangkau layanan pendidikan.
- Persoalan distribusi guru, terutama untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah swasta. Seperti sudah diketahui, sekolah-sekolah swasta (terutama dari 5 yayasan pelopor pendidikan di Papua) memiliki peran penting di masa silam dan memiliki jangkauan yang lebih luas.

Uraian

Persoalan Penuntasan Kebutuhan Guru

- BP3OKP menemukan bahwa terdapat sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru, sementara sekolah ini memiliki siswa yang terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Guru-guru yang semestinya bertugas di sini mangkir karena berbagai sebab. Sebagian guru sudah ditarik ke struktural (ke dinas pendidikan dan ke dinas-dinas yang lain).
- Formasi P3K pada tahun sebelumnya belum mengakomodasi guru-guru honorer di sekolah swasta. Peraturan yang berlaku masih membatasi penerimaan P3K untuk guru-guru honorer di sekolah negeri. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah sekolah-sekolah swasta di Papua mengalami kondisi yang kurang beruntung. Padahal sekolah swasta yang lebih banyak di seluruh Papua.
- Pada tahun belakangan ini, pemerintah menempuh cara memenuhi kebutuhan guru dengan menggandeng yayasan yang merekrut guru-guru, baik dari Papua maupun dari luar wilayah Papua, dan menempatkan mereka di sekolah-sekolah yang belum memiliki guru. Dalam temuan BP3OKP langkah ini dalam batas tertentu membantu anak-anak mendapatkan layanan pendidikan. Akan tetapi, masalah lain yang terkait dengan strategi

ini juga muncul. Perlu pendalaman lebih jauh untuk mengkaji persoalan penempatan guru dari luar Papua, terutama di wilayah-wilayah konflik.

- BP3OKP mengusulkan agar pengisian formasi guru P3K untuk Papua dapat mengecualikan ketentuan linieritas, yaitu guru adalah Sarjana 1 dari ilmu pendidikan (S.Pd) mengingat guru-guru yang dengan penuh komitmen bekerja di wilayah 3T selain sebagian S.Pd ada juga dari latar belakang keilmuan lain tanpa gelar S.Pd.
- Kolese Pendidikan Guru Khas Papua, yang dirintis pada 2001, mengikuti arus kebijakan Otonomi Khusus dirancang dalam visi untuk memenuhi kebutuhan guru di Papua. KPG berusaha menjawab kebutuhan masyarakat-masyarakat di dusun-dusun yang tidak terlayani oleh sekolah-sekolah. Akan tetapi, menilik keadaan saat ini dan pencapaian-pencapaian KPG sejauh ini, dan dalam semangat untuk memenuhi kebutuhan guru dari Orang Asli Papua, KPG memerlukan revitalisasi, reorientasi, dan rekonseptualisasi secara menyeluruh. Harapannya, KPG menjadi pijakan yang penting untuk penyiapan calon-calon mahasiswa guru yang selaras dengan ketentuan undang-undang dan selaras dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Persoalan distribusi guru

- Jumlah sekolah swasta (YPK, YPPK, YPPGI, Yapis, dan Advent) lebih banyak dan lebih tersebar daripada sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah ini hadir sampai ke pelosok-pelosok kampung. lembaga-lembaga swasta yang bernaung dalam karya misi Gereja ini memberikan pendidikan bagi anak-anak.
- Sekolah-sekolah yang memiliki murid tapi tanpa guru secara umum adalah sekolah-sekolah di wilayah 3T. Sebagian besar adalah sekolah swasta yang sudah ada di wilayah itu sejak lama. Sekolah swasta menderita kekurangan guru lebih serius. Untuk hal ini, peta data yang lebih komprehensif akan disiapkan untuk memberikan potret yang lebih utuh.
- Situasi konflik yang terjadi di Kabupaten-kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan Tambraw, telah memaksa pada guru untuk pindah ke pusat kota demi alasan keamanan. Sekolah-sekolah ditinggalkan. Hak anak-anak untuk pendidikan tidak terlayani.
- Sementara, sekolah-sekolah yang memiliki jumlah guru cukup, serta mungkin kualitas kompetensi lebih baik cenderung berada di pusat kota atau wilayah yang tidak jauh dari kota.
- Tiadanya peluang untuk menjadi guru P3K sekarang ini belum terbuka bagi guru-guru honorer di sekolah swasta membuat para guru honorer di sekolah-sekolah yayasan merasa “kurang beruntung”. Jalan mereka untuk memperbaiki nasib belum terbuka. Kenyataan ini kadang membuat mereka tergoda untuk meninggalkan sekolah swasta tempat mereka bekerja selama ini.
- Keadaan ini juga kurang menguntungkan bagi sekolah-sekolah swasta. Guru-guru mereka belum bisa menjadi pegawai P3K; yang mereka harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Persoalan: bagaimana sekolah-sekolah swasta ini bisa mendapatkan guru dengan status P3K?

Tanggapan

Persoalan perluasan akses dan pemenuhan hak pendidikan untuk anak-anak di wilayah konflik

- Sebelum menanggapi persoalan-persoalan, pihak Sekretaris Dirjen meminta masukan peserta terkait pendekatan keamanan yang dilakukan untuk menjaga sekolah-sekolah dan guru-guru di wilayah konflik. Peristiwa penembakan di Yahukimo memperlihatkan bahwa pendekatan ini malah kontraproduktif. Guru-guru dari luar dipandang sebagai bagian dari TNI/Polri. Masyarakat tidak percaya. Sekolah dibakar. Sebaiknya, untuk wilayah konflik guru-guru direkrut dari penduduk setempat dan melalui yayasan-yayasan yang memang sudah lama bekerja di Papua.

- Pada pertemuan ini, Sekretaris Dirjen menyampaikan garis besar arahan kebijakan menteri pendidikan. Pertama, wajib belajar ditambah menjadi 13 tahun. Satu tahun tambahan adalah prasekolah. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, digitalisasi pembelajaran.
- Usulan yang terakhir ini mendapatkan respon positif dari Kementerian. Lima yayasan pelopor yaitu YPK, YPPK, YPPGI, Yapis, dan Yayasan Advent akan diundang untuk pertemuan.

Tindak Lanjut

- Kementerian Pendidikan siap membantu menyelenggarakan pertemuan daring dengan para guru yang belum mengikuti PPG. Pihak kementerian akan membantu strategi agar dapat lolos masuk PPG.
- Kementerian menghendaki data menyeluruh dari masing-masing kabupaten untuk pengusulan formasi P3K Khusus yang akan dibantu pengusulan ke Kemen PAN-RB.
- Mengagendakan pertemuan lima yayasan pelopor untuk rekrutmen guru-guru sebagai upaya pemenuhan kebutuhan guru.
- Material pembahasan lebih lanjut untuk revitalisasi KPG mohon segera disiapkan. BP3OKP memfasilitasi pertemuan KPG-KPG untuk menyatukan langkah.



➤ Rapat bersama Dirjen Paudidasmen di Jakarta (Kamis, 24 April 2025)

Topik Rapat

- Perluasan akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, yang tidak terjangkau layanan pendidikan.
- Penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah konflik (Kab. Intan Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Maybrat, Kab. Tambora, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya)

Persoalan perluasan akses pendidikan anak-anak

- **Kategori anak dengan persoalan akses pendidikan: Anak-anak yang tidak memiliki akses sama sekali dan anak-anak dengan akses sangat terbatas ke pendidikan. Anak tanpa akses pendidikan sama sekali umumnya berada di kampung-kampung dengan jumlah penduduk sedikit, sehingga tidak memiliki kecukupan ratio untuk pengadaan unit sekolah. Atau, anak-anak di kampung yang sebelumnya pernah dilayani oleh karya pelayanan pendidikan namun karena sejumlah faktor layanan pendidikan terhenti. Sementara jarak kampung mereka ke kampung yang terdapat layanan pendidikan cukup jauh, tidak ada layanan transportasi.**

- Jumlah kampung atau dusun yang tidak memiliki sekolah ini cukup banyak. Umumnya berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. BP3OKP berharap dapat mengumpulkan data kampung-kampung yang tidak memiliki sekolah.
- Anak-anak dengan akses ke pendidikan sangat terbatas ini rentan putus sekolah. Akses sangat terbatas ini disebabkan beberapa faktor: kemiskinan, jarak yang jauh ke sekolah dan ditempuh dengan jalan kaki, situasi lingkungan yang kadang-kadang terjadi konflik sehingga tidak aman, dan faktor guru jarang masuk ke sekolah sehingga membuat anak merasa tidak akan belajar.
- Pada saat ini, BP3OKP berpikiran bahwa di kampung-kampung itu, dimana terdapat anak-anak usia sekolah tetapi tidak ada sekolah, dapat dibangun sekolah kecil (kelas 1 - 3) dan dapat juga dibuka kelas filial atau kelas jauh dari sekolah terdekat ke kampung itu.
- Untuk mencapai target Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah strategi pemerataan akses pendidikan merupakan keharusan. Langkah ini sangat bermakna untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah penduduk pada umumnya.
- Pemerataan akses ini idealnya memang serentak dengan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Gagasan ini sejalan dengan visi kementerian untuk Pendidikan bermutu bagi semua. Strategi peningkatan kualitas ini tidak bisa tidak langsung berhubungan dengan penyiapan tenaga guru dan pendidikan.
- Perluasan akses pendidikan ke kampung-kampung ini penting memperhatikan juga strategi yang diterima oleh penduduk setempat. Pendekatan pemberian akses anak-anak terhadap pendidikan mesti mengedepankan pemahaman yang mendalam terhadap jiwa penduduk setempat dan situasi konflik, terutama di wilayah-wilayah yang sudah berat menderita konflik.

Penyediaan pendidikan untuk anak-anak di wilayah konflik

- Saat ini terdapat 7 kabupaten di seluruh Papua yang diwarnai oleh konflik bersenjata, Kabupaten-kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Maybrat. Penduduk dari area konflik dan wilayah sekitar mengungsi. Sebagian ke pusat kota dan sebagian yang lain ke kabupaten yang lain. Sekolah-sekolah tutup. Guru-guru mencari keselamatan. Anak-anak tidak lagi berkegiatan di sekolah. Jumlah mereka cukup banyak.
- Rincian total untuk masing-masing jenjang pendidikan di 7 kabupaten tersebut adalah sebagai berikut; **PAUD (1.411 anak); TK (1.855 anak); SD (86.628 siswa); SMP (21.200 siswa); SMA (5.159 siswa); SMK (1.688 siswa); PKBM (6.874 siswa).**
- Karena konflik, mereka kehilangan layanan pendidikan selama beberapa tahun ini. Keadaan ini sangat berpengaruh pada kualitas hidup mereka saat ini dan di masa depan.
- BP3OKP memikirkan layanan pendidikan untuk anak-anak ini. Namun, dalam situasi sekarang ini Pemerintah daerah tidak mampu. Oleh karena itu, persoalan layanan pendidikan untuk anak-anak di wilayah konflik ini mohon ditangani oleh pemerintah pusat.
- Usulan penyediaan layanan pendidikan untuk anak-anak di wilayah konflik dari BP3OKP adalah menyediakan penambahan ruang kelas di sekolah-sekolah yang ada di pusat pemerintah, menyediakan shelter atau penampungan. Pemerintah juga diminta memberikan bantuan serupa di Kabupaten Jayawijaya, sebab sejumlah anak wilayah konflik mengungsi ke Wamena. Untuk tahun 2025, BP3OKP menargetkan fokus sasaran ini pada anak-anak wilayah konflik Kabupaten Intan Jaya dan Pegunungan Bintang.

Tanggapan

Penuntasan pemenuhan kebutuhan guru dan distribusi guru di Papua Persoalan perluasan akses dan pemenuhan hak pendidikan untuk anak-anak di wilayah konflik

- Pada pertemuan ini, Sekretaris Dirjen menyampaikan garis besar arahan kebijakan menteri pendidikan. Pertama, wajib belajar ditambah menjadi 13 tahun. Satu tahun tambahan adalah prasekolah. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, digitalisasi pembelajaran.
- Usulan yang terakhir ini mendapatkan respon positif dari Kementerian. Lima yayasan pelopor yaitu YPK, YPPK, YPPGI, Yapis, dan Yayasan Advent akan diundang untuk pertemuan.
- Untuk mendongkrak IPM Provinsi Papua Tengah, dan Papua secara keseluruhan, memang pemerataan pendidikan menjadi keharusan. Kualitas pendidikan pun penting untuk dibangun. Untuk itu Unit-unit sekolah baru mesti dibuka. Usulan dalam bentuk proposal pembukaan sekolah baru silakan diajukan.
- Secara konkrit, dalam pertemuan itu juga, Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang menyerahkan proposal pendirian USB. Proposal diterima oleh Bapak Sekretaris Dirjen. Pihak Dirjen membuka batas pengusulan USB, dalam bentuk proposal, sampai dengan akhir Mei 2025 untuk usulan tahun 2026. Syarat yang pokok adalah surat kepemilikan tanah dan pelepasan adat.
- Usulan untuk mengadakan bangunan sekolah bagi anak-anak di wilayah konflik, yaitu Intan Jaya dan Pegunungan Bintang, langsung diterima dan akan segera ditindak lanjuti. Kementerian siap melakukan.

Tindak Lanjut

- Bantuan Dana Revitalisasi, USB PAUD dan SMA sesuai usulan yang masuk yaitu USB SMA SATAP pada tahun 2025 melalui Dana Blocgrand
- Bantuan USB PAUD, Rehap dan bantuan alat pembelajaran jenjang PAUD,TK,SD,SMP,SMA,SMK akan dibantu dalam bentuk blockgrand pada tahun anggaran 2025. Data penerima sudah ditetapkan kementerian dan diminta Pemda pastikan data di lapangan termasuk haerga satuan bangunannya
- Bantuan Revitalisasi pada 2 SD dan 2 SMP di sugapa dan di bilogai sesuai usulan BP3OKP langsung di jawab dan akan dilakukan rehap melalui dana blockgrand pada tahun anggaran 2024
- Usulan USB SD,SMP,SMK diajukan melalui DAK 2026
- Pengusulan USB SMA dan PAUD dalam bentuk proposal masih terbuka sampai dengan akhir Mei 2025. Harus menyertakan surat bukti kepemilikan tanah dan surat pelepasan adat.
- BP3OKP mengumpulkan data detail kampung atau dusun yang tidak terdapat unit layanan pendidikan dari masing-masing daerah.



Demikian Rangkuman hasil yang di capai dari kegiatan BP3OKP di Bulan April 2025 sebagai berikut.

B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS

Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama pelaksanaan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan April 2025, memberikan Rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1. Sesuai Tusi dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja (papua sehat,papua cerdas,papua produktif dan papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;
- b Dari kesimpulan rapat SHEK di 8 wilayah adat dan provinsi, kami akan kawal setiap program yang kerja 5 tahun kedepan gubernur dan 8 bupati di papua tengah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, produktifitas dan politik hukum dan keamanan;
- c Berkaitan Rapat SHEK penyelesaian batas wilayah adat antara suku mee & suku kamoro/wee akan berlanjut dan atau diprioritaskan karena kami akan mengundang suku kamoro/wee untuk menyampaikan sesuai versi mereka yang tinggal dibatas wilayah adat tersebut;
- d Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balakai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersa
- e PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten mengalami devisit anggaran ;
- f Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada presentasi, namun diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing-masing Kabupaten/kota;
- g Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan penyelesaian maka akan berdapak pada masalah kejahatan konvensional/tradisonal seperti pemalangan, pembunuhan,

perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor public/pemerintah dan swasta, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya.

2. Tata Kelola Sekretaritan BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan, asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok Kerja dan sekretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (BP3OKP)
- b. Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;
- c. Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/situasi darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah, sehingga kasus pembunuhan, kasus perkelahian antar suku, pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam mengalami keterlambatan dalam penanganannya;
- d. Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus diketahui oleh Masyarakat publik, namun selama ini tidak terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya Publikasi/Media di KPPN Nabire;
- e. Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi, sesuai pasal 68.a UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar disamakan dengan Badan-Badan Khusus lain yaitu MRPT, DPRPPT, DPRK, BP3OKP dan DPD RI dalam kedudukan dan penganggaran.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan April 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan semua pihak terutama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, MRPPT, DPRPT, DPRPPT, dan Para Bupati serta mitra pembangunan lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

